

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 4 November 2022

**PENGEMBANGAN PARIWISATA MELALUI PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN**

Dewi Safitri¹, Mardiana², Restina Safitri³

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: dewisafitri8855@gmail.com, mardiana13201@gmail.com,
restinasafitri18@gmail.com

Abstrak

Pariwisata menjadi objek penting dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya pengembangan pariwisata diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat terpinggir. Tetapi hal tersebut belum dikembangkan dengan baik, sehingga belum berjalan sesuai yang direncanakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat dari perspektif kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap pengembangan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, didapat melalui penelusuran dari berbagai literatur (riset kepustakaan). Pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan meningkatkan efektivitas yang berkaitan dengan adanya tindakan keseluruhan dan dapat berpengaruh pada pariwisata yang sedang dikembangkan. Untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bintan perlunya pemberdayaan masyarakat sekitar dengan menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang diberikan untuk pengembangan pariwisata menjadi hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Implementasi Kebijakan.

Abstract

Tourism is an important object in sustainable development. With the development of tourism is expected to help the economy of marginalized communities. But it has not been developed properly, so it has not gone as planned. This study aims to provide an understanding of community empowerment from a policy perspective that has an influence on tourism development. This study uses a qualitative approach, obtained through a search from various literatures (library research). Tourism development and management aims to improve the welfare of the community by utilizing all tourism resources in accordance with sustainable tourism development policies. The success of tourism development must be done by increasing the effectiveness associated with the overall action and can affect the tourism being developed. To develop tourism in Bintan Regency, it is necessary to empower the surrounding community by implementing established policies. The policies provided for tourism development are important for the welfare of the community.

Keywords: Tourism, Community Empowerment, Policy Implementation

Pendahuluan

Pariwisata merupakan sebuah industri yang perkembangannya kian pesat setiap tahunnya. Indonesia sektor pariwisata dikembangkan sebagai sektor yang menjanjikan serta mendatangkan pendapatan besar bagi negara terlebih di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam maupun sumber daya budaya yang melimpah. Berbagai potensi digali untuk menarik minat para wisatawan untuk datang berkunjung sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Husni & Safaat, 2019)

Pariwisata merupakan suatu yang dimana tahap perkembangannya semakin pesat tiap tahunnya. Di Indonesia sendiri sektor pariwisata yang akan dikembangkan dapat menjadi salah satu sektor yang sangat menjanjikan serta mampu mendatangkan berbagai pendapatan besar bagi Negara terutama di daerah-daerah yang dimana memiliki sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya budaya yang melimpah. Semua potensi yang ada akan digali untuk bisa menarik minat para wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara untuk dapat berkunjung ke daerah tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tersebut. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan terkuat dalam perekonomian dunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama perekonomian dunia karena terdapat beberapa keuntungan yang mampu memberikan devisa cukup besar bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan budaya negara. (Sabon et al., 2018)

Pariwisata dapat dikatakan suatu aktivitas yang sangat kompleks dan dapat dipandang sebagai suatu sistem sektor yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai ragam komponen yakni seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial dan budaya. Pada saat pariwisata dipandang sebagai suatu sistem, maka akan dianalisis tentang kepariwisataan tidak akan bisa dilepaskan dari subsistem yang lainnya, seperti politik, sosial ekonomi dan juga budaya. (Rusyidi & Fedryansah, 2018)

Di Indonesia kunjungan wisatawan mancanegara ke Tanah Air meningkat mencapai 1.8 hingga 3.6 juta sepanjang 2022. Di tahun ini juga, ada potensi terbukanya 34 juta lapangan kerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi kinerja sektor pariwisata, pemerintah mengalokasikan tambahan APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp298,5 miliar, memberikan insentif airlines, travel agent, insentif dalam skema joint promotion, kegiatan promosi pariwisata. Pemerintah juga memberikan tarif nol pada pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata.

Dalam pengembangan pariwisata banyak sekali berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memajukan pariwisata tersebut, yakni seperti diperlukan mengidentifikasi dan juga menggali apa saja potensi objek-objek yang menjadi salah satu daya tarik wisata, pengelolaan dan pengembangan dari potensi pariwisata yang harus terus dilakukan, serta adanya pengembangan sarana dan juga prasarana pariwisata yang harus terus ditingkatkan dan dimodifikasi dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pengembangan pariwisata menurut Singgalen et al, (2017) terdapat beberapa komponen penting, antara lain industry pariwisata, tujuan wisata, pemasaran, dan lembaga pariwisata. Konsep pemberdayaan sendiri menurut Sutawa (2012) muncul sebagai upaya untuk memberikan hak bersuara atau berpendapat bagi komunitas lokal atau orang-orang pinggiran yang pada saat ini berada di kondisi ketidakberdayaan. (Febriandhika & Kurniawan, 2020)

Alternatif pariwisata yang didasarkan kepada pelestarian dan juga pemberdayaan masyarakat yang bersifat lokal salah satunya berbentuk desa wisata, yang dimana pada proses pengembangan wisata yang dilakukan berdasarkan kepada potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut disertai dengan adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah Indonesia sudah mulai mengoperasikan pengembangan pariwisata. Dalam mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat, maka sangat diperlukan adanya beberapa pendekatan pengembangan pariwisata yang melibatkan peran aktif masyarakat melalui pengembangan pariwisata. Pariwisata yang berbasis masyarakat berperan sebagai pendekatan pemberdayaan yang melibatkan dan meletakkan masyarakat sebagai pelaku penting dalam paradigma baru yang titik fokusnya pada pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengatur daerah dan mengelola kekayaan yang terdapat dari daerah tersebut seperti saat ini. Pengaturan atas dasar hak ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 2 ayat 4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut “Kebudayaan dan Pariwisata” merupakan salah satu urusan wajib yang diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. (Usman et al., 2022)

Bintan adalah pulau terbesar dari total 3,214 pulau di Propinsi Kepulauan Riau. Pulau seluas 59.852,01 Km² ini sekarang dihuni oleh lebih dari 117.000 jiwa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006, Pulau Bintan ditetapkan menjadi Kabupaten Bintan sejak 23 Februari 2006. (Prakoso & De Lima, 2019)

Kabupaten Bintan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau merupakan kabupaten yang bertitik fokus pada pengembangan pariwisata baik secara internasional maupun lokal. Kabupaten Bintan memiliki banyak sekali potensi pariwisata yang berasal dari sumber daya alam (SDA), hingga data juga mencakup aspek seni dan budaya yang dimana sejak awal Bintan sudah di proyeksikan sebagai sebuah pulau yang berguna untuk tempat wisata dan peristirahatan para wisatawan asing maupun mancanegara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel tersebut mengkaji terkait pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat yang dilihat dari perspektif implementasi kebijakan yang ada di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Dari pembahasan ini nantinya diharapkan mampu dapat memberikan pemahaman mengenai konsep pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan dari perspektif implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif untuk mendapatkan gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai beberapa pengalaman individu-individu dalam pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat itu sendiri. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan berupaya menelusuri data-data yang bersifat histories. Menurut Creswell (2009) teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara kualitatif akan melalui penelusuran dari berbagai literatur (riset kepustakaan), seperti buku dan jurnal.

Pengumpulan data dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai data sekunder dan data primer. Data sekunder yang berupa dokumen-dokumen terkait dengan implementasi kebijakan dan program kebijakan dalam pengembangan pariwisata yang diterapkan di

Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan data primer diarahkan untuk menggali informasi secara langsung di lapangan terkait dengan pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat, yang dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam.

Teknik analisis data penelitian ini dijelaskan oleh Miles et al (2008), yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, kondensasi data terkait pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, atau transformasi data yang akan muncul dari berbagai studi literatur yang berhubungan juga dengan kebijakan pengembangan pariwisata melalui pemberdayaan masyarakat dan juga berkaitan dengan suatu implementasi kebijakannya. Kedua, penyajian data akan merujuk pada penyusunan penarikan kesimpulan sebagai bentuk dari hasil analisis.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pariwisata

Keberadaan sektor pariwisata salah satunya dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat, sehingga perlunya sumbangan dukungan dari kebijakan pariwisata yang nantinya akan mendorong partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan. Menurut Edgell *et al.* (2008), berupa tindakan, petunjuk, arahan, serta prinsip dan prosedur yang didalamnya berisi tentang perencanaan, pengembangan, produk, sasaran, pemasaran, dan tujuan yang jelas terkait pariwisata yang berkelanjutan. (Febriandhika & Kurniawan, 2020)

Penyelenggaraan pariwisata disetiap daerah sangat bergantung kepada kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan sumber daya keuangan yang nantinya akan mendukung berjalannya kegiatan pariwisata itu sendiri. Sebuah kebijakan pariwisata tidak hanya mengatur tentang bagaimana rencana pengembangan destinasi pariwisata itu sendiri, tetapi juga terkait dengan industri pariwisata, pemasarannya, dan bagaimana sistem kelembagaannya. Dalam pembuatan kebijakan pariwisata, para pembuat kebijakan harus mempertimbangkan dari aspek wisatawan, penyedia jasa wisata, dan masyarakat lokal disekitar destinasi wisata tersebut. hal ini penting dikarenakan dengan adanya pariwisata nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan baik bagi wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut maupun juga masyarakat yang tinggal disana.

Permasalahan implementasi dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dapat dilihat aspek sosial hingga ke aspek kelembagaannya sendiri. ketidak berhasilan implementasi kebijakan pariwisata yang berkelanjutan menurut Dodds (2010) dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu prioritas ekonomi, dukungan pemangku kepentingan, fokus pada pemilihan, integrasi kedalam bentuk kebijakan yang lebih luas. Keterlibatan sektor swasta juga terkadang terbatas dalam perumusan kebijakan dan perencanaan pariwisata, karena peran pemerintah yang sangat dominan.

Untuk membangkitkan perekonomian melalui wisatawan domestik di dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bintan dibentuk beberapa strategi pemulihan pariwisata yang ada dikabupaten bintan. Adanya pemberian intensif dan relaksasi kebijakan yang dikhususkan kepada pengusaha dan masyarakat yang ada disektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata melalui beberapa kegiatan seperti memberikan penghapusan sanksi administratif pajak daerah kepada seluruh wajib pajak yang memiliki objek pajak dikabupaten Bintan.

Kebijakan selanjutnya mengubah target pasar dari mancanegara ke wisatawan nusantara melalui penguatan pariwisata yang berbasis masyarakat didesa wisata yang berbentuk kegiatan berupa pembinaan dan pelatihan.

Pengembangan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dilihat Dari Perspektif Implementasi Kebijakan

Menurut Krutwaysho *et al.* (2010), bahwa implementasi kebijakan pariwisata terhubung dengan proses kemasyarakatan yang didalamnya berkaitan dengan konteks sosial mereka, termasuk ekonomi, pemerintahan, masyarakat, dan budaya. Pada prinsipnya kebijakan yang telah dibuat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan interaksi dari berbagai aspek lingkungan kebijakan, pelaksana kebijakan yang sebenarnya, dan target kebijakannya.

Pemerintah kabupaten Bintan menjalankan Kebijakan Pengembangan Pariwisata berkelanjutan yang didasari oleh peraturan bupati Bintan No. 27 Tahun 2013 tentang rencana induk pembangunan penyelenggaraan kepariwisataan. Secara umum kebijakan ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata. Keberhasilan pengembangan pariwisata tidak bisa diukur dari pembangunan fisik saja, melainkan untuk meningkatkan efektifitas dalam pengembangan pariwisata yang perlu adanya tindakan secara keseluruhan, pengembangan harus dilakukan pada segala aspek yang berkaitan dan berpengaruh pada pariwisata tersebut. Beberapa tindakan dalam pengembangan pariwisata antara lain, revitalisasi fisik, pengembangan pengelolaan pasar, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan proteksi terhadap sumber alam yang bersifat langka.

Kebijakan pariwisata merupakan suatu produk dari proses yang sangat kompleks dan berkaitan dengan berbagai aspek. Dalam konteks perubahan besar terhadap lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang startegis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya, oleh karena itu kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata. Salah satu stakeholder yang memiliki peranan penting adalah pemahaman baik dari pemerintah dalam merencanakan dan mengimplementasikan semua perencanaan pariwisata secara konsisten dan berkelanjutan. Pemerintah tentu akan menaruh perhatian dan memastikan bahwa pembangunan pariwisata tersebut akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial, ekonomi, dan dampak lingkungan (wanhill, dalam Theobald, 2005).

Pemilihan terhadap instrumen kebijakan akan sangat menentukan apabila didasarkan kepada kajian yang utuh terhadap tujuan yang ingin dicapai dengan cara seefisien mungkin, tidak didasarkan pada kajian yang parsial dan tidak menyeluruh. Hal terpenting juga perlu didasari oleh moral dan kemauan politik yang baik. Isu-isu yang berkembang saat ini mengenai perencanaan pariwisata hanya lebih menekankan aspek teknis saja padahal sebenarnya merupakan masalah politik yang menyangkut regulasi terhadap semua komponen pariwisata yang ada dalam rangka menuju pariwisata berkelanjutan (Teobald, 2005).

Peran kerjasama juga harus dibangun dalam proses pemberdayaan masyarakat disekitar daerah pariwisata, dengan menyediakan kuliner khas daerah pariwisata tersebut, seperti ikan, udang, kepiting, dan seafood lainnya untuk parawisatawan yang berkunjung ketempat pariwisata tersebut. Serta adanya konsep ekowisata yang dapat dijadikan

sebagai sarana atau alat pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat lokal yang secara ekonomi terpinggirkan.

Berikut Daftar Pariwisata Di Kabupaten Bintan:

Tabel. 01

| Destinasi Pariwisata | Kelurahan/Kota |
|-----------------------------|--|
| Gurun Pasir Bintan | Jl. Raya Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan |
| Desa Wisata E kang | Teluk Sebong, Jl. Jendral Sudirman, Kabupaten Bintan |
| Kampung Teripang | Jl. Granat, Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan |
| E kang Mangrove Park | Jl. M.Mufid, E kang Anculai, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan |
| Agro Wisata Poyotomo | Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan |
| Treasure Bay Bintan | Jl.Raja Haji. No.KM 01, Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan |
| One Of Kind Resort | Pantai Trikora 3, Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, kabupaten Bintan |
| Pantai Pengudang | Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan |
| Bintan Mangrove | Sebong Lagoi, Teluk Sebong, Kabupaten Bintan |
| Pulau Beralas Pasir | Teluk Bakau, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan |

Berikut ini daftar jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kabupaten bintan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel. 02

| Nama Daerah | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli |
|--------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Bintan | 88 | 31 | 367 | 2.998 | 5.281 | 12.509 | 16.988 |

(sumber: BPS Kabupaten Bintan)

Kesimpulan

Pariwisata menjadi objek wisata yang banyak dikunjungi dan dapat menguntungkan perekonomian daerah dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pariwisata sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan meningkatkan efektivitas yang berkaitan dengan adanya tindakan keseluruhan dan dapat berpengaruh pada pariwisata yang sedang dikembangkan. Pengembangan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal didesa terpinggir. Kebijakan yang diberikan untuk pengembangan pariwisata menjadi hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Avianti, Lisa. (2019). *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) IDOLA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*. UIN Raden Intan Lampung.
- Chandler, David. (2012). Resilience and human security: The post-interventionist paradigm. *Security Dialogue*, 43(3), 213–229.
- Creswell, Kasey G., Terry-McElrath, Yvonne M., & Patrick, Megan E. (2022). Solitary alcohol use in adolescence predicts alcohol problems in adulthood: A 17-year longitudinal study in a large national sample of US high school students. *Drug and Alcohol Dependence*, 238, 109552.
- Esfe, Mohammad Hemmat, Wongwises, Somchai, Naderi, Ali, Asadi, Amin, Safaei, Mohammad Reza, Rostamian, Hadi, Dahari, Mahidzal, & Karimipour, Arash. (2015). Thermal conductivity of Cu/TiO₂–water/EG hybrid nanofluid: Experimental data and modeling using artificial neural network and correlation. *International Communications in Heat and Mass Transfer*, 66, 100–104.
- Hack, Lucy, Kenyon, Alexandra J., & Wood, Emma H. (2014). A critical corporate social responsibility (CSR) timeline: How should it be understood now. *International Journal of Management Cases*, 16(4), 46–55.
- Huda, Nurul, & Sawarjuwono, Tjiptohadi. (2013). Akuntabilitas pengelolaan zakat melalui pendekatan modifikasi action research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(3), 376–388.
- Khodijah, Febriana Vivit. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESEHATAN WARGA DI KAWASAN TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH TERPADU BANTARGEBAWANG KOTA BEKASI DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN JUNCTO UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN.
- Kurniullah, Ardhariksa Zukhruf, Faried, Annisa Ilmi, Saragih, Hisarma, Wisnujati, Nugrahini Susantinah, Amruddin, Amruddin, Syafrizal, Syafrizal, Yusa, I. Made Marthana, Hasnidar, Hasnidar, Daud, Daud, & Prijanto, Jossapat Hendra. (2021). *Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Yayasan Kita Menulis.
- Natsir, Muhammad, Putri, Yulianti Ika, Wibowo, Dwiprayogo, Maulidiyah, Maulidiyah, Salim, La Ode Agus, Azis, Thamrin, Bijang, Catherina M., Mustapa, Faizal, Irwan, Irwan, & Arham, Zul. (2021). Effects of Ni–TiO₂ pillared Clay–Montmorillonite composites for photocatalytic enhancement against reactive orange under visible light. *Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials*, 31(8), 3378–3388.
- Nisson, Peyton L., Fard, Salman A., Walter, Christina M., Johnstone, Cameron M., Mooney, Michael A., Meybodi, Ali Tayebi, Lang, Michael, Kim, Helen, Jahnke, Heidi, & Roe, Denise J. (2019). A novel proposed grading system for cerebellar arteriovenous malformations. *Journal of Neurosurgery*, 132(4), 1105–1115.
- Nuelle, Julia A. V, Coe, Kelsie M., Oliver, Harvey A., Cook, James L., Hoernschemeyer, Daniel G., & Gupta, Sumit K. (2020). Effect of NSAID use on bone healing in pediatric fractures: a preliminary, prospective, randomized, blinded study. *Journal of Pediatric Orthopaedics*, 40(8), e683–e689.
- Sari, Ertha Colanda, Hartono, Madi, & Suharyati, Sri. (2017). Faktor-faktor yang

- memengaruhi service per conception sapi perah pada peternakan rakyat di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu*, 4(4).
- Sumarwan, Antonius. (2022). *How does Credit Unions' accountability affect their performance and mission achievement? Multiple-case studies of credit unions in Indonesia*. Queensland University of Technology.
- Waskitho, Nugroho Tri. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Khdtk Umm Dalam Konservasi Kawasan Hutan Melalui Sistem Agroforestri. *BUDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2).
- Werner, Rachel M., Hoffman, Allison K., & Coe, Norma B. (2020). Long-term care policy after Covid-19—solving the nursing home crisis. *New England Journal of Medicine*, 383(10), 903–905.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.